

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT. BPR SINAR MITRA SEJAHTERA  
TAHUN 2023**



**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
Sinar Mitra Sejahtera**

**Jl. Abdulrahman Saleh No.199  
Kota Semarang  
TELEPON: 024-76637101 / 024-76439999**

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Pengertian Umum Tata Kelola PT BPR Sinar Mitra Sejahtera.

Tata Kelola BPR dapat memberikan gambaran yang jelas agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip- prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) di dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Tujuan Penerapan Tata Kelola PT BPR Sinar Mitra Sejahtera:

- a. Meningkatkan kinerja BPR;
- b. Melindungi kepentingan stakeholder BPR;
- c. Meningkatkan kepatuhan manajemen dan karyawan BPR terhadap peraturan perundang-undangan.

Komitmen PT BPR Sinar Mitra Sejahtera dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan :

- a. Berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip- prinsip GCG ke dalam kebijakan operasional yang berlaku;
- b. Berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyesuaian pelaksanaan GCG sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga BPR dapat meningkatkan performa Tata Kelola BPR yang baik dan memiliki daya saing tinggi;
- c. Berkomitmen untuk terus mempraktekkan penerapan Tata Kelola BPR yang baik untuk menjadikan BPR sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun lembaga jasa keuangan di Indonesia khususnya di Jawa Tengah.

Prinsip penerapan GCG di PT BPR Sinar Mitra Sejahtera mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	Nama	: Cornelly Lidwina Smith
	NIK	: 3374105811670002
	Jabatan	: Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menentukan kebijakan umum dalam memimpin Bank untuk mencapai tujuan perusahaan.</li> <li>2. Bertanggung jawab kepada semua kegiatan dalam tugas operasional bank dan membawa misi pengenalan dan misi perusahaan pada umumnya dengan melakukan fungsi humas.</li> <li>3. Bertanggung jawab dan mengurus harta kekayaan perusahaan dan mengawasi serta mengelola hubungan ataupun transaksi usaha dan keuangan perusahaan.</li> <li>4. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja perusahaan setiap tahun, bersama – sama dengan semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi.</li> <li>5. Mengadakan perubahan – perubahan dalam struktur organisasi sesuai dengan perkembangan usaha bank.</li> <li>6. Membuat keputusan dalam hal memberikan jumlah pinjaman kepada calon nasabah (debitur) yang masuk dalam batas wewenangnya.</li> <li>7. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, bersama – sama dengan semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sekaligus menyampaikan laporan pertanggung jawaban Direksi untuk tahun buku bersangkutan.</li> <li>8. Menandatangani surat – surat berharga dan dokumen penting perusahaan baik sendiri ataupun bersama dengan anggota dewan komisaris sesuai dengan aturan yang ada.</li> <li>9. Menandatangani surat keputusan direksi secara sendiri atau bersama – sama yang meliputi ketentuan internal, memo internal, skala gaji, promosi, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian karyawan.</li> <li>10. Membina hubungan dengan para pejabat Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia dan Departemen keuangan agar tercipta kerjasama dan bimbingan dari kedua instansi Pembina tersebut.</li> <li>11. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah menunjukkan pengabdian dan kesetiaannya kepada bank.</li> <li>12. Bertanggung jawab terhadap pencapaian rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.</li> <li>13. Menandatangani laporan – laporan bank yang penting khususnya laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia dan pihak – pihak ekstern lainnya.</li> </ol>		
2.	Nama	: Rudi Kurniawan
	NIK	: 3374012206680001
	Jabatan	: Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan dan meningkatkan prudential banking agar dalam kegiatan bank</li> </ol>		

- senantiasa berpedoman kepada Standar Operasional dan Prosedur (SOP), kepatuhan dan Manajemen Risiko.
2. Menyusun perencanaan dan konsep-konsep strategis pencapaian sasaran-sasaran kerja sesuai dengan perencanaan anggaran Direktur Utama yang telah ditetapkan dalam rapat kerja tahunan.
  3. Mewakili Direksi dalam hal Direktur Utama sedang berhalangan.
  4. Meningkatkan image pelayanan bank melalui penciptaan program inovatif, efektif dan efisien serta menentukan segmentasi pasar kredit dan produk dana pihak ketiga (DPK).
  5. Meningkatkan hubungan baik dengan nasabah utama (Captive) dan menciptakan nasabah baru (menambah customer base), baik dari sektor peternakan maupun sektor potensial lainnya.
  6. Meningkatkan tertib administrasi, khususnya dalam hubungan dengan perkreditan agar tercipta pengelolaan bank yang hati-hati atau prudential banking.
  7. Menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan lembaga-lembaga yang berkaitan erat dengan kredit dan pendanaan.
  8. Meningkatkan pembinaan dan penyelesaian atas kredit-kredit bermasalah agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga.
  9. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur sesuai dengan tingkat kebutuhan setiap unit kerja yang ada di bawahnya.
  10. Mengkoordinasi dan memantau pelaksanaan satuan kerja di bawah supervisi Direktorat Bisnis.

**Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :**

1. Menindaklanjuti temuan umum pemeriksaan OJK tahun 2023.
2. Mengevaluasi fungsi audit internal dan fungsi kepatuhan serta manajemen risiko.
3. Menindaklanjuti penyetoran modal inti tambahan dalam rangka upaya penyehatan BPR.
4. Efisiensi sumber daya manusia.
5. Pengkinian Pedoman Penerapan Program APU,PPT dan PPPSPM.
6. Penunjukan AP dan/atau KAP untuk tahun 2023.
7. Meningkatkan strategi penghimpunan dana untuk menjaga likuiditas BPR.

**Penjelasan Lebih Lanjut :**

Nihil

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Bernardus Dwisampurno
	NIK	:	3374062404680006
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun;</p> <p>b. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>c. Dewan Komisaris melakukan reviu atas suatu transaksi dalam rangka pelaksanaan pengawasan. Hasil reviu dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan. Tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini.</p> <p>d. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab</p>		

<p>menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>e. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</p> <p>f. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Pejabat Eksekutif Audit Intern dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain;</p> <p>g. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan</li> <li>2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.</li> </ol> <p>k. Dewan Komisaris wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya</li> <li>2) Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.</li> </ol>
<p><b>Rekomendasi Kepada Direksi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan tindak lanjut atas temuan umum pemeriksaan OJK tahun 2023.</li> <li>2. Mengevaluasi fungsi audit internal dan fungsi kepatuhan serta manajemen risiko.</li> <li>3. Menindaklanjuti penyeteroran modal inti tambahan dalam rangka upaya penyehatan BPR.</li> <li>4. Melakukan efisiensi sumber daya manusia.</li> <li>5. Menyetujui pengkinian Pedoman Penerapan Program APU,PPT dan PPPSPM.</li> <li>6. Rekomendasi atas Penunjukan AP dan/atau KAP untuk tahun 2023.</li> <li>7. Meningkatkan strategi penghimpunan dana untuk menjaga likuiditas BPR.</li> </ol>
<p><b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b></p> <p>Nihil</p>

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
<i>Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite</i>	
BPR belum memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.	

## b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	BPR belum memiliki Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite	

## c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR belum memiliki anggota Komite Audit, Pemantau Resiko dan Remunerasi dan Nominasi.			

## B. Kepemilikan Saham Direksi

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Cornelly Lidwina Smith	3374105811670002	Rp0	0%
2.	Rudi Kurniawan	3374012206680001	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				

Seluruh anggota Direksi BPR tidak memiliki saham pada BPR.

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Cornelly Lidwina Smith	3374105811670002	-	-	0%
2.	Rudi Kurniawan	3374012206680001	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Seluruh anggota Direksi BPR tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain.					

## C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Cornelly Lidwina Smith	3374105811670002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Rudi Kurniawan	3374012206680001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Antar anggota Direksi BPR tidak memiliki hubungan keuangan.					

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Cornelly Lidwina Smith	3374105811670002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Rudi Kurniawan	3374012206680001	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Antar anggota Direksi BPR tidak memiliki hubungan keluarga.					

## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Bernardus Dwisampurno	3374062404680006	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR.				

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Bernardus Dwisampurno	3374062404680006	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Perusahaan Lain					

## E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Bernardus Dwisampurno	3374062404680006	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Antar anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan.					

## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Bernardus Dwisampurno	3374062404680006	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Antar anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga.					

## F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp364.800.000	1	Rp68.000.000
2.	Tunjangan	2	Rp66.000.000	0	Rp0
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp430.800.000		Rp68.000.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Cukup jelas.					

### 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil Dinas dan Operasional (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Asuransi Kesehatan (2)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Cukup jelas.			

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2.4 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3.2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.5 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Cukup jelas.	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	01 Februari 2023	2	1. Pembahasan penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2023. 2. Persetujuan penyesuaian Rencana Bisnis Bank Tahun 2023.
2.	16 Juni 2023	2	1. Efisiensi sumber daya manusia. 2. Rencana penyetoran modal inti tambahan. 3. Memastikan rencana tindak yang telah ditetapkan oleh Direksi dapat berjalan sesuai rencana. 4. Menindaklanjuti temuan-temuan OJK. 5. Melakukan penyegaran Pelatihan APU, PPT dan PPPSPM untuk seluruh karyawan BPR.
3.	20 September 2023	2	1. Tindak Lanjut atas Rapat Dewan Komisaris tanggal 16 Juni 2023. 2. Rencana dan/atau strategi untuk menjaga likuiditas BPR agar stabil. 3. Menjaga kualitas debitur.
4.	31 Oktober 2023	2	1. Tindak lanjut atas Rapat Dewan Komisaris tanggal 20 September 2023. 2. Menyetujui usulan Direksi atas penjualan AYDA dengan memberikan potongan/cut loss yang akan diajukan kepada PSP BPR. 3. Meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga

			untuk menjaga likuiditas BPR. 4. Rencana pengkinian pedoman penerapan program APU, PPT dan PPPSPM sesuai dengan POJK Nomor 8 Tahun 2023.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan secara langsung.			

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Bernardus Dwisampurno	3374062404680006	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali pertemuan secara langsung.					

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Selama tahun 2023 tidak terdapat penyimpangan internal yang terkait dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Karyawan Tetap dan Karyawan Tidak Tetap.								

## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	3	0
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>Penjelasan Lebih Lanjut</b>		
Selama tahun 2023 terdapat permasalahan hukum yang dihadapi yang telah selesai sebanyak 1 (satu), sedangkan yang masih dalam proses penyelesaian sebanyak 3 (tiga).		

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Penerima Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
<b>Penjelasan Lebih Lanjut :</b>									
Selama tahun 2023 tidak terdapat transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan.									

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	11 Mei 2023	Sosial	Acara Halal Bi Halal RT 007 RW 007	Lingkungan RT 007 RW 007	Rp100.000
2.	07 Agustus 2023	Sosial	Acara Kegiatan HUT RI di Lingkungan RT 007 RW 007	Lingkungan RT 007 RW 007	Rp100.000
3.	26 Oktober 2023	Sosial	Pemberian Paket Sembako untuk Anak-anak Panti Asuhan Nurul Qur'an	Panti Asuhan Nurul Qur'an	Rp1.276.500
4.	22 November 2023	Sosial	Pemberian Paket Sembako untuk Anak-anak Panti Asuhan Wikrama Putra	Panti Asuhan Wikrama Putra	Rp1.259.000
5.	28 Desember	Sosial	Pemberian Paket	Panti Asuhan	Rp845.500

2023		Sembako untuk Anak-anak Panti Asuhan Kyai Ageng	Kyai Ageng	
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik				
Cukup jelas.				

Semarang, 10 Januari 2024

**PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera**

  
**Cornelly Lidwina Smith**  
Direktur Utama & YMF Kepatuhan



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
Sinar Mitra Sejahtera

  
**Bernardus Dwisampurno**  
Komisaris

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera
Alamat	: Jl. Abdulrahman Saleh No.199 Kota Semarang
Nomor Telepon	: 024-76637101 / 024-76439999
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp4.760.228.257
Total Aset	: Rp131.872.030.947

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 2.7 dengan predikat Cukup Baik (3)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	2.67	0.534
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2.84	0.426
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0.2
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.9	0.29
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.33	0.233
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	3	0.075
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	3	0.3
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	3.05	0.229
10	Rencana Bisnis BPR	3	0.225
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2.8	0.21
Nilai Komposit			2.7
Peringkat Komposit			3

Predikat Komposit

Cukup Baik

## B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 2.67)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi selama tahun 2023 telah dilaksanakan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari : Jumlah anggota Direksi BPR telah terpenuhi sepenuhnya, salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan; Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kota yang sama dengan Kantor Pusat BPR berada; Rapat anggota Direksi telah dilaksanakan dan didokumentasikan dengan baik; Target realisasi RBB tahun 2023 sebagian besar tidak tercapai.

### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 2.84)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris selama tahun 2023 telah dilaksanakan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari : Jumlah anggota Dewan Komisaris telah terpenuhi sepenuhnya dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) orang Komisaris sampai dengan akhir Bulan November 2023, dan salah satu anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Kota yang sama dengan Kantor Pusat BPR; Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pengawasan Dewan Komisaris belum dilakukan secara optimal.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Belum memiliki komite.

### 4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

Selama tahun 2023, aktifitas usaha BPR tidak ada yang menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR.

### 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.9)

Selama tahun 2023, penerapan fungsi kepatuhan telah dilaksanakan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari : anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana; Telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan, namun belum maksimal dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya; Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan cukup baik didalam memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan namun masih harus mendalami lagi lebih terperinci didalam pelaksanaan peraturan mengenai Fungsi Kepatuhan dan Manajemen risiko.

#### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.33)**

Selama tahun 2023, penerapan fungsi Audit Intern telah dilaksanakan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari : BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Audit Intern dan telah tercatat di dalam sistem administrasi pengawasan OJK, namun dalam hal pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya masih terdapat kelemahan- kelemahan; BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern; Penyampaian laporan-laporan terkait pelaksanaan audit intern telah dilaporkan tepat waktu.

#### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 3)**

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek- aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.

#### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 3)**

Selama tahun 2023, Penerapan Manajemen Risiko pada BPR telah dilaksanakan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari : BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko dan telah tercatat di sistem administrasi pengawasan OJK, namun dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masih terdapat kelemahan- kelemahan; BPR telah memiliki pedoman manajemen risiko dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris; BPR telah menyusun laporan profil risiko dan dilaporkan tepat waktu.

#### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 3.05)**

Selama tahun 2023, terdapat pelampauan BMPK karena Modal Inti BPR menurun, namun BPR telah membuat action plan pelampauan BMPK dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### **10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 3)**

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, namun target realisasi RBB belum sepenuhnya tercapai.

#### **11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2.8)**

Selama tahun 2023, BPR telah menerapkan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan dengan cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari : BPR telah mempunyai sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh; BPR telah menyusun Laporan Tahun dan Laporan Publikasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu; BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

### **C. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola : BPR senantiasa berpedoman pada Visi dan Misi yang telah

ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing- masing struktur organisasi telah berjalan dengan cukup baik, masih diperlukan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi masing- masing struktur organisasi dengan sosialisasi dan pelatihan secara berkala;

2. Proses Tata Kelola : Pedoman Kebijakan serta Tugas dan fungsi dari semua bagian telah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan cukup baik. BPR senantiasa mendorong budaya Kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Dan BPR perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan terbaru dari Otoritas dan dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional BPR yang terjadi sekarang ini.

3. Hasil Tata Kelola : Selama tahun 2023, BPR masih dapat beroperasi dan kinerja dengan cukup baik. Kecukupan modal masih memadai, dan dapat mengcover potensi kerugian dan dikelola dengan baik sesuai dengan skala usaha dan kompleksitasnya. Namun BPR masih terdapat kredit bermasalah yang cukup tinggi sehingga ke depan dapat mempengaruhi perolehan laba BPR.

Semarang, 10 Januari 2024

**PT. BPR Sinar Mitra Sejahtera**



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
Sinar Mitra Sejahtera



**Cornelly Lidwina Smith**  
Direktur Utama & YMF Kepatuhan



**Bernardus Dwisampurno**  
Komisaris